



::TEMUAN BPK ATAS PENDAPATAN DAERAH TA 2016

Pemkot Persilakan Dewan Bentuk Pansus

YOGYAKARTA – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta mempersilakan kalangan Dewan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2016 untuk mendalami temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

DIY. Namun demikian, BPKAD juga akan menerjunkan tim internal guna merespon rekomendasi yang diberikan BPK.

"Silakan kalau mau ada pansus. Tapi kami juga berupaya untuk membenahi dan mengevaluasi hasil temuan BPK atas PAD Kota Yogyakarta 2016,"

jelas Kepala BPKAD Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, kemarin.

Diketahui, berdasar hasil pemeriksaan akhir Januari lalu, BPK mencatat ada enam poin temuan atas audit APBD Kota Yogyakarta 2016. Dalam surat dari BPK bernomor 31/-

S/XVIII.YOG/01/2017 tertanggal 31 Januari 2017, enam poin ini merupakan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2016 pada Pemkot Yogyakarta. Khususnya untuk menilai dan memberisim-

pulan tentang efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), penilaian risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban pendapatan daerah.

Ke Hal 14

Pemkot Persilakan Dewan Bentuk Pansus

Dari Hal 13

Di antaranya terkait pengelolaan pendapatan pajak hotel, restoran, dan hiburan yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, pendapatan penyelenggaraan reklame yang tidak berizin dan habis masa izin, minimal sebesar Rp953,2 juta berpotensi tidak dapat direalisasikan. Juga temuan pengendalian atas pengelolaan pajak parkir yang masih lemah, dan 71 wajib pajak di antaranya belum melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan.

Tidak hanya menyangkut pendapatan daerah dari sektor pajak saja, BPK juga menyoroti penerimaan dari retribusi. Yaitu terkait klasifikasi penerimaan pada retribusi pelayanan pasar tidak tepat dan penatausahaan serta penerapan sanksi atas tunggakan pembayaran retribusi pelayanan pa-

sar belum sesuai ketentuan. Retribusi pelayanan pasar meliputi sewa los, kios, dan lapak dipasar tradisional.

Selain itu juga penatausahaan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yang dinilai BPK tidak tertib. Hal ini karena temuan retribusi kurang bayar senilai Rp363,2 juta yang belum dirinci per wajib pajak.

Menurut Kadri, dengan dibentuknya Pansus juga bisa memperkuat upaya evaluasi internal oleh jajaran sehingga bisa mengatasi persoalan yang menjadi temuan BPK. "Untuk pajak hotel memang seharusnya hotel menjadi wajib pajak begitu mereka sudah mendapatkan izin operasional. Sementara, untuk sampah, memang harus didukung dengan pendataan terkait tunggakan," jelas Kadri memapar-

kan hasil evaluasi sementara.

Sementara itu terkait kebijakan diperpanjangnya masa tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) diakuinya tidak ada hubungannya dengan temuan BPK. Meskipun tugas pokok tim khusus yang diketuai Sekda Kota Yogyakarta itu juga fokus untuk menyelesaikan temuan BPK atau Inspektorat jika ada kerugian keuangan daerah.

Sebelumnya, Komisi B DPRD Kota Yogyakarta mendesak dibentuknya Pansus guna mendalami temuan sekaligus mengawasi Pemkot Yogyakarta agar menjalankan rekomendasi dari BPK.

"Di laporan itu ada enam poin yang menjadi temuan BPK. Kami ingin supaya dibentuk pansus untuk me-

mudahkan pengawasan," kata Ketua Komisi B, Nasrul Khairi yang mengaku komisinya juga mendapat tembusan hasil audit BPK tersebut.

Dalam waktu dekat ini, lanjut Nasrul, Komisi B akan mengundang BPK DIY guna mendapatkan penjelasan langsung tentang hasil pemeriksaan yang dilakukan.

"Jika pimpinan dewan sepakat membentuk pansus, maka fungsi pengawasan akan lebih maksimal. Pansus memiliki kewenangan yang lebih dalam untuk mendalami semua temuan BPK," jelasnya.

Di samping itu, pansus juga dapat membuat rekomendasi khusus agar temuan BPK tidak berulang di tahun-tahun berikutnya.

"Saya berharap, temuan ini sebagai prioritas agenda untuk bisa mengurai problem

optimalisasi PAD. Jika PAD optimal, maka bisa menjadi solusi dalam menutup celah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat," imbuhnya.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistyio mendukung pembentukan pansus oleh DPRD sebagai bagian dari fungsi kontrol yang menjadi tugas kalangan legislatif. Hasil pemeriksaan BPK juga akan menjadi bahan evaluasi agar ada perbaikan sistem pemungutan maupun penatausahaan untuk mengoptimalkan PAD.

"Kami justru sangat senang adanya pemeriksaan, ini membuktikan sistem dalam pemungutan pajak masih ada kelemahan. Kami akan tindak lanjut rekomendasi BPK," tandasnya.

ristuhanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005